

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi kemajuan zaman, pembangunan ekonomi pada suatu negara berperan penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah termasuk dalam hal kesejahteraan rakyatnya. Dalam kegiatan ekonomi secara nyata, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fiskal dari produksi barang dan jasa yang berlaku pada suatu negara, seperti peningkatan dan jumlah produksi barang industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan jumlah sekolah, peningkatan produksi sektor jasa dan peningkatan produksi barang modal. Oleh karena itu, untuk membuat penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, ukuran yang digunakan yaitu tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang sudah dicapai oleh negara tersebut.

Pendapatan nasional sering diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang didefinisikan sebagai harga pasar (*market price*) atau nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, PDB merupakan bagian penting dalam melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara, jika PDB negara tersebut dari tahun ke tahun meningkat, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian negara tersebut stabil atau baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya nilai dan jumlah produksi dari barang atau jasa dengan jangka waktu tertentu. Tingkat kesejahteraan rakyat pada suatu negara tentunya sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di

negara tersebut. Terdapat beberapa indikator dari pertumbuhan ekonomi yaitu pendapatan nasional yang meningkat, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja lebih banyak dari pengangguran, dan tingkat kemiskinan yang berkurang.

Menurut Sukirno (2006), definisi dari pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi di masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan yang berkembang yang terjadi dalam perekonomian sehingga menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat meningkat dan dalam jangka panjang kemakmuran masyarakat juga ikut meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses mulai dari kondisi perekonomian yang terjadi di sebuah negara karena adanya perubahan dalam jangka waktu tertentu untuk menuju keadaan yang lebih baik (Rahmadani *et al.*, 2019).

Pertumbuhan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa tanda yang ada, seperti produktivitas barang atau jasa yang meningkat dan meningkatnya pendapatan negara. Indikator ekonomi makro salah satunya dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang berarti menggambarkan sampai mana keberhasilan pengembangan suatu daerah dalam suatu periode, dan dari indikator ini dapat digunakan dalam penentuan arah kebijakan untuk pembangunan ke depannya.

Dalam Al-Qur'an bisnis disebut juga dengan perniagaan atau perdagangan, tentunya kegiatan perniagaan sudah ada sejak zaman jahiliyah dahulu kala dikenal oleh manusia. Ajaran Islam pun di dalamnya dengan tegas menghalalkan perdagangan atau aktivitas jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan sebelum

diutus untuk menjadi rasul Allah S.W.T, Nabi Muhammad SAW. pun merupakan seorang pedagang yang jujur. Kegiatan perniagaan pun juga dibahas oleh Allah dalam surah Al-Quraisy, yaitu dimana suku Quraisy melakukan perjalanan untuk berdagang ke arah utara saat musim panas dan juga ke arah selatan saat musim dingin. Sebagai manusia tentunya bermasyarakat dan saling tolong menolong satu sama lain, sebagai makhluk sosial pun manusia saling bermuamalah satu sama lain dalam menjalankan aktivitas di hidupnya. Seperti yang tertera pada surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. [QS. An-Nisa (4): 29]

Seluruh dunia menghadapi pandemi Covid-19, termasuk juga Indonesia. Awal mula Covid-19 masuk di Indonesia sejak bulan Maret 2020 dan terus bertambah hingga tahun 2021. Adanya penambahan kasus Covid-19 saat pandemi ini sangat berpengaruh di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Saat terjadinya pandemi, di sektor ekonomi tentunya sangat mempengaruhi pada beberapa hal, seperti pada tingkat konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi masyarakat rendah yang mengakibatkan pendapatan rill nasional menurun sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pun mengalami kelesuan. Menurut teori ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi diukur dari seberapa besar

perkembangan dari pendapatan nasional riil yang dapat diperoleh dalam suatu negara tersebut (Amboningtyas *et al.*, 2021).

Pada tahun 2020, terjadi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Perekonomian global tentunya terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19, mulai dari aspek kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, hingga stabilitas sistem keuangan. Dalam upaya menanggulangi penyebaran Covid-19, upaya kesehatan pun dilakukan meskipun terbatasnya mobilitas dan kegiatan ekonomi sehingga munculnya ketidakpastian pasar keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang kontraktif di dunia. Menurut Bank Indonesia, ekonomi global mengalami kontraksi pada semester I 2020, dan perlahan membaik pada semester II 2020, didorong dengan penanganan Covid-19 yang mengalami peningkatan, mobilitas yang meningkat, dan dampak stimulus kebijakan yang terintegratif dan bersinergi antarotoritas dan antarnegara.

Pada semester I tahun 2020, pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi cukup dalam yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Adanya kondisi tersebut berdampak pada menurunnya volume perdagangan dunia dan harga komoditas. Bersamaan dengan majunya penanganan Covid-19, meningkatnya mobilitas, dan dampak stimulus kebijakan, kinerja perekonomian global mulai membaik pada semester II 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi mengalami pengurangan di berbagai negara, seperti di Amerika Serikat dan kawasan Eropa, bahkan ekonomi Tiongkok mulai tumbuh positif. Adanya perkembangan tersebut membuat ekonomi global mengalami pertumbuhan secara

menyeluruh 2020 diperkirakan berkontraksi 3,8% (yoy), dibawah pertumbuhan 2019 sebesar 2,8% (yoy).

Tabel 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2021

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2019	5,02
2020	-2,07
2021	3,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), 2024

Berdasarkan data diatas dilihat bahwa dari tiga tahun yaitu dari tahun 2019-2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia berfluktuasi. Mulai dari tahun 2019 yang belum terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%. Lalu pada tahun 2020 mengalami pandemi Covid-19 dimana semua sektor mengalami kelumpuhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Namun seiring berjalannya waktu dan pandemi pun mulai mereda, perekonomian kembali pulih pada tahun 2021 dan laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,69%. Hal ini menunjukkan berbagai sektor kembali hidup dan masyarakat juga dapat kembali bekerja, sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan.

Indeks Harga Konsumen (IHK) berkaitan kuat dengan inflasi. Kenaikan harga suatu komoditas dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat diartikan sebagai bukti adanya inflasi pada komoditas tersebut. Pemerintah dapat menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi sebagai tolok ukur ketika

memutuskan kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah juga dapat menggunakan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk menentukan tingkat inflasi.

Pemerintah menggunakan inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk menentukan harga jual komoditas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atas pilihan yang diambil. Pemerintah akan mempertimbangkan dampak produsen dan konsumen ketika mengambil keputusan. Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber data bagi konsumen. Kemunculan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi secara bersamaan berfungsi sebagai penanda untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang merangsang dan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2020 tercatat rendah 1,68% (yoy) dan berada dibawah kisaran sasaran $3,0\pm 1\%$, dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2021 tetap rendah dan berada dibawah kisaran sasaran $3,0\pm 1\%$. Secara bulanan, inflasi IHK pada Desember 2020 mencapai 0,45% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 0,28% (mtm). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi Desember lima tahun sebelumnya sebesar 0,67% (mtm). Inflasi IHK 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2020 sebesar 1,68% (yoy). Inflasi yang rendah pada tahun 2020 dan 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat karena dampak dari pandemi Covid-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan

Bank Indonesia dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga.

Tingkat produksi akan meningkat jika jumlah tenaga kerja yang ada lebih besar, dan jumlah tenaga kerja yang besar dapat meningkatkan jumlah tenaga produktif. Input tenaga kerja melalui keterampilan, pengetahuan dan disiplin merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu negara atau wilayah, meskipun mampu membeli berbagai peralatan canggih, tetapi tidak dapat mempekerjakan tenaga kerja terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang modal tersebut secara efektif (Eliza, 2015).

Tersedianya jumlah tenaga kerja yang banyak, berarti dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif. Tenaga kerja produktif ini diperoleh melalui tenaga kerja terampil yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produksi, dan selanjutnya dapat meningkatkan PDRB. Dengan kata lain, jumlah tenaga kerja memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Tenaga kerja adalah modal dalam pergerakan roda pembangunan. Komposisi dan jumlah angkatan kerja akan terus berubah seiring dengan adanya proses demografi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tetap harus didukung dengan tersedianya tenaga kerja, baik tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja kasar (buruh), pengembangan tenaga kerja juga perlu didukung dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya. Dalam hal ini diikuti dengan peran sumber daya pemuda sebagai pelaksana pembangunan yang secara langsung maupun tidak

langsung dalam hal menentukan langkah, karakteristik dan berhasilnya pembangunan itu sendiri.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam ketenagakerjaan. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi salah satu ukuran dalam kegiatan ekonomi untuk melihat fluktuasi partisipasi penduduk usia kerja. TPAK didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau disebut angkatan kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) terhadap seluruh penduduk usia kerja. Dalam kelompok pemuda, TPAK adalah proporsi pemuda (penduduk yang berusia 16-30 tahun) yang terlibat dalam kegiatan ekonomi terhadap pemuda itu sendiri (Mirah *et al.*, 2020).

Keadaan wilayah yang berbeda-beda mendorong setiap daerah untuk menangkap potensi yang dimiliki, salah satunya potensi sumber daya manusia (SDM). Dalam menciptakan suatu output, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu modal yang dapat disejajarkan dengan modal fisik atau sumber daya alam. Daya saing produktivitas yang dikeluarkan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (Mulyasari, 2016).

Dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi (PDRB) maka diperlukan tabungan dan investasi modal manusia. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas menjadi pemicu dalam membuat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Sumber pembangunan sumber daya manusia (SDM) diperoleh dari bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi investasi yang utama. Investasi

bidang pendidikan dan kesehatan menyatu dalam pendekatan human capital yang fokusnya pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan (Mulyasari, 2016).

Banyaknya angkatan kerja dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan penduduk yang kerjanya secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Tingkat produksi yang dihasilkan akan semakin besar jika diikuti dengan semakin banyaknya angkatan kerja yang bekerja dan nantinya pertumbuhan ekonomi dapat meningkat sebagai dampak adanya hal tersebut.

Teori neoklasik membagi tiga jenis input yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pengaruh modal, teknologi, dan angkatan kerja yang bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pandangan kaum neoklasik ini bahwa kemajuan teknik dan perbaikan kualitas buruh cenderung dapat meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi sehingga permintaan masyarakat akan meningkat dan seterusnya (Mulyasari, 2016).

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu sumber daya yang dibutuhkan bagi perekonomian suatu daerah maupun suatu negara. Adanya tahapan revolusi industri 4.0 membuat sebuah tantangan pada saat ini dan juga di masa depan dalam hal kesempatan mendapatkan pekerjaan. Angkatan kerja tidak memandang status pekerjaan dari penduduk, dimana penduduk yang usianya masuk usia produktif dan menganggur dikategorikan sebagai angkatan kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang, naik 2,36 juta orang dibandingkan Agustus 2019. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,24% poin. Namun terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 membuat tingkat pengangguran pun menjadi bertambah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 7,07%, mengalami peningkatan 1,84% poin dibandingkan dengan Agustus 2019.

Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019. Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 139,81 juta orang, naik 1,59 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2020. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,31% poin. Pada tahun 2021 pandemi Covid-19 mulai mereda, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 6,26%, turun 0,81% dibandingkan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,06 juta orang, meningkat sebanyak 2,61 juta orang dari Agustus 2020.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pemeran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di dunia, tidak hanya di negara berkembang saja, tetapi juga di negara maju. Di negara maju, UMKM dianggap penting karena kelompok usaha ini dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan usaha besar, selain itu UMKM juga berkontribusi dalam

pembangunan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi usaha besar (Aryansyah *et al.*, 2020).

Pertumbuhan ekonomi sektor riil Indonesia menjadi faktor utama dalam menggerakkan ekonomi nasional. Saat krisis 1998 dan pandemi Covid-19, UMKM terbukti dapat menjadi unit usaha yang mampu bertahan di masa sulit, UMKM dapat menjadi garda terdepan yang mampu bertahan dalam menghadapi masalah ekonomi. UMKM yang berada di Indonesia sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2019 Indonesia memiliki 65,4 juta UMKM. Dengan unit usaha hingga 65,4 juta dan dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Dalam hal ini maka membuktikan kontribusi dan dampak UMKM sangat besar dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja UMKM yang terlibat, maka akan mengurangi jumlah pengangguran di negara ini.

Saat ini UMKM berada dalam tren yang positif dikarenakan setiap tahun jumlahnya yang semakin bertambah. Adanya tren positif ini maka akan berdampak baik pada perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kemterian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Dalam hal ini maka menunjukkan UMKM di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan agar dapat berkontribusi lebih besar lagi pada perekonomian. UMKM sangat padat karya, sehingga berpotensi menumbuhkan besarnya kesempatan kerja. Terkhusus pada UMKM, pertumbuhan UMKM dapat dijadikan sebagai elemen penting dari

kebijakan-kebijakan nasional dalam meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama pada masyarakat miskin. Maka diperlukan adanya pembangunan ekonomi untuk masa depan yang terletak pada kemampuan UMKM untuk berkembang secara mandiri.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pondasi perekonomian nasional. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar pelaku usaha Indonesia merupakan para UMKM, sehingga UMKM di Indonesia kerap menjadi sorotan dan berperan mengembangkan ekonomi secara signifikan. Sektor UMKM berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61% atau senilai Rp9.580 triliun, bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja.

Pada negara berkembang maupun negara maju, dalam hal pembangunan ekonomi UMKM memiliki peran yang penting dikarenakan lapangan kerja dan pertumbuhan output meningkat yang diciptakan oleh UMKM. Semakin lama pun UMKM memiliki peran yang penting dalam perkembangan ekonomi di dalam negeri karena berdampak pada semakin banyaknya lapangan kerja dan *Gross Domestic Product* (GDP) yang semakin meningkat. UMKM menjadi salah satu bidang ekonomi yang berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah negara, karena UMKM tersebar di berbagai

wilayah seperti di kota maupun di desa, sehingga menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak (Fauziah, 2021).

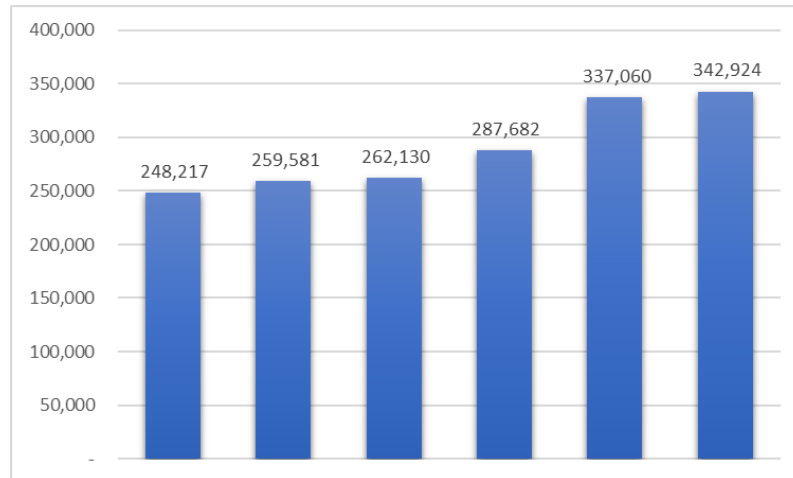
Pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, hanya sektor UMKM yang bertahan dari guncangan ekonomi dibandingkan dengan usaha yang lebih besar yang tumbang karena krisis. Adanya krisis ini membuat perubahan pada kedudukan pelaku sektor ekonomi. Kebangkrutan terjadi pada usaha besar karena secara drastis bahan baku impor mengalami peningkatan, serta adanya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menurun dan berfluktuasi membuat biaya cicilan utang meningkat. Sektor perbankan yang ikut terpuruk juga memperparah sektor industri di sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu melanjutkan usahanya karena bunga yang tinggi, tetapi UMKM dapat bertahan ataupun bertambah.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang istimewa di Indonesia, istimewa disini karena dari sisi pemerintahan dan budaya masyarakat Provinsi D.I. Yogyakarta yang istimewa. Membahas Yogyakarta mengingatkan dengan budaya serta kreatifitas. Terdapat banyak kreatifitas yang muncul di Yogyakarta, mulai dari sektor pariwisata, sektor kerajinan, sektor kuliner, dan sektor-sektor lainnya yang menjadi tombak perekonomian Yogyakarta. Pada triwulan I tahun 2022 kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi DIY sebesar 79,6% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY. Jumlah UMKM D.I. Yogyakarta sendiri terdiri di lima kabupaten/kota, yaitu Kota Yogyakarta,

Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan baik dalam negeri maupun negeri, sehingga tentunya banyak sekali wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya. Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang banyak terdapat di Yogyakarta, yang mana pelaku usahanya sendiri berupa masyarakat asli Yogyakarta sendiri maupun masyarakat luar kota.

Tidak dipungkiri karena banyaknya jumlah UMKM yang ada, membuat banyak tenaga kerja terserap dan potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian D.I. Yogyakarta pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,15% dengan semua lapangan usaha tumbuh secara positif, hal ini lah yang membuat pemerintah DIY semakin fokus untuk mengembangkan potensi UMKM dan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta.



Sumber: Bappeda Provinsi DIY, 2024

Gambar 1.1
Jumlah UMKM Provinsi DIY Tahun 2017-2022

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM keseluruhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2017 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 hingga tahun 2020, peningkatan jumlah UMKM tidak terlalu signifikan, namun saat tahun 2021 UMKM mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga menyentuh angka 337.060 unit usaha, diikuti peningkatan pada tahun 2022 sebesar 342.924 unit usaha. Dalam hal ini tentunya sudah jelas terlihat bahwa UMKM berkembang dengan pesat berpengaruh penting dalam perekonomian Provinsi D.I. Yogyakarta.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu destinasi yang menarik dan berpotensi untuk mengembangkan dunia usaha. Jumlah unit usaha UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya dan ditambah lagi dengan potensi alam, wisata sejarah dan budaya, serta wisata-wisata lainnya yang dimiliki D.I. Yogyakarta menjadikan provinsi ini menjadi wilayah yang subur dalam

pertumbuhan dunia usaha atau UMKM. Tentunya adanya pengembangan UMKM akan meningkatkan perekonomian yang ada di daerah baik secara individu maupun keseluruhan (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. UMKM sendiri memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, terutama yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat, dan bahkan UMKM banyak tersebar hingga ke pelosok-pelosok daerah, sehingga perekonomian masyarakat daerah bisa terus tumbuh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadani *et al.*, 2020), dengan judul “*Pengaruh Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*” dengan hasil dari penelitian ini bahwa dengan uji secara parsial UMKM, inflasi dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan hasil uji simultan UMKM, inflasi, dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan secara keseluruhan bahwa variabel UMKM, inflasi dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam penelitian tersebut. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, UMKM, inflasi dan pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena diantara variabel tersebut merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian Zubairi & Soesatyo (2016), yang berjudul “*Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sampang*” menyatakan bahwa pertumbuhan UMKM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang pada tahun 2005-2014, dan pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang pada tahun 2005-2014.

Penelitian yang dilakukan Tasyim *et al.*, (2021) tentang “*Pengaruh Jumlah Unit Usaha UMKM dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Utara*”, bahwa secara parsial jumlah unit usaha UMKM dan PDRB tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan secara regresi dan simultan jumlah unit usaha UMKM dan PDRB berkontribusi secara simultan dan positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Utara. Dalam dua penelitian ini menyatakan adanya kesamaan hasil dalam variabel UMKM yang berpengaruh signifikan, dan penulis pun menggunakan variabel UMKM ke dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa pengaruh Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan angkatan kerja penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka peneliti berminat memberikan judul penelitian “*Pengaruh Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022*”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak melebar dan supaya lebih rinci, maka dibutuhkan pembahasan masalah untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi yang diperlukan. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel yang digunakan yaitu: Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen (Y), sedangkan Jumlah UMKM (X1), IHK (X2), Angkatan Kerja (X3).
2. Dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2017-2022. Pada tahun 2022 digunakan sebagai tahun akhir dari periode penelitian ini.
3. Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada uraian yang terdapat di latar belakang, permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022?
3. Bagaimana pengaruh Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh Jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022.
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022.
3. Menganalisis seberapa besar pengaruh Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan mampu sebagai bahan tambahan informasi untuk melakukan penelitian terkait.
2. Bagi pemerintah. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada pemerintah tentang kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan adanya pengaruh pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bagi akademisi dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis berikutnya.